

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan pembangunan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kabupaten Bekasi juga merupakan kawasan yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini sedang berlangsung. Pembangunan jalan tol, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan bangunan sekolah, serta membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan lainnya. Dengan kecepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di Kabupaten Bekasi.

Dalam melakukan pembangunannya, dibutuhkan sumber dana yang memadai. Sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa yang telah diatur dalam undang-undang. Sumber dana yang berasal dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum membangun sarana dan prasarana masyarakatnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan langsung oleh pemerintah saat melaksanakan kewajibannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan tepat waktu. Masyarakat wajib pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dapat diukur dari kepatuhannya dalam melaporkan SPT pajaknya.

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT di KPP Cibitung

Keterangan	Tahun Pajak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah WP Terdaftar	311.309	338.879	370.766	404.285	478.019
Jumlah WP Wajib SPT	163.340	145.077	146.212	148.675	115.914
Jumlah WP Laporan SPT	82.408	80.030	89.680	84.948	97.928

Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2021

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat kenaikan dan penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Setiap tahunnya, jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami kenaikan. Sedangkan, jumlah WP yang wajib SPT dan jumlah WP lapor SPT mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah WP wajib SPT mengalami kenaikan dari 146.212 menjadi 148.675 dengan jumlah WP lapor SPT yang mengalami penurunan dari 89.680 menjadi 84.948. Pada tahun 2020 jumlah WP wajib SPT mengalami penurunan dari 148.675 menjadi 115.914 dengan jumlah WP lapor SPT yang mengalami kenaikan dari 84.948 menjadi 97.928. Dapat disimpulkan bahwa, tingkat kepatuhan dapat mengalami kenaikan dikarenakan penurunan jumlah WP yang wajib SPT tahun lalu serta meningkatnya kepatuhan WP dalam melaporkan SPT terjadi karena upaya-upaya yang rutin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyampaian SPT wajib pajak, di antaranya adalah sosialisasi perpajakan. Masalah muncul karena kurangnya upaya sosialisasi perpajakan yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Beberapa masyarakat wajib pajak masih belum paham bagaimana tata cara yang benar saat melaporkan SPT tahunannya. Maka dari itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha keras dalam mengadakan sosialisasi perpajakan yang rutin untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat dalam membayar

pajak, menghitung pajak, dan melaporkan SPT-nya. Penelitian yang dilakukan oleh (Farah, 2020) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin seringnya sosialisasi dilakukan maka akan mengubah wajib pajak menjadi patuh terhadap kewajiban pajaknya. Apabila sosialisasi tidak sering dilakukan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Faktor selanjutnya adalah pelayanan fiskus. Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak memerlukan petugas yang membantu dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak. Petugas fiskus yang sopan, ramah dan dapat melayani dengan sepenuh hati akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang akan menciptakan wajib pajak yang patuh. Petugas pajak diharapkan juga memiliki keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang perpajakan untuk membantu wajib pajaknya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan fiskus harus terus ditingkatkan untuk menciptakan wajib pajak yang patuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanty & Zulaika, 2020) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Candisari.

Faktor penting lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sanksi pajak. Bagi masyarakat wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja melanggar norma perpajakan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang agar merasakan efek jera. Sanksi pajak diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Sanksi pajak yang akan diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan berlakunya tingkat sanksi perpajakan yang tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya. Sebaliknya apabila sanksi perpajakannya masih rendah akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT-nya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2016-2020 DI KPP PRATAMA CIBITUNG KABUPATEN BEKASI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi ?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Cibitung Kabupaten Bekasi.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara bersama terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara umum dan menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.
 - b. Bagi Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan untuk meningkatkan kepatuhan terkait pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
 - b. Bagi Masyarakat Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan agar lebih taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh tiga variabel yang akan digunakan, yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi tahun pajak 2016-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijabarkan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijabarkan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi penelitian variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijabarkan profil organisasi, hasil analisis data, pembahasan analisis data, dan hasil dari penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijabarkan kesimpulan dari penelitian serta implikasi manajerial dari penelitian ini.